

# **SKRIPSI**

## **EVALUASI PENERAPAN SISTEM AKUNTANSI PENGELUARAN KAS PENGGAJIAN PEGAWAI NEGERI SIPIIL PADA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI SULAWESI UTARA**

**Disusun Oleh:**

**Raymundus Huanito Vigo Lolong**

**NIM : 20043080**



**KEMENTERIAN RISET TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI  
POLITEKNIK NEGERI MANADO - JURUSAN AKUNTANSI  
PROGRAM STUDI SARJANA TERAPAN AKUNTANSI KEUANGAN  
TAHUN 2024**

## DAFTAR ISI

SKRIPSI.....	i
HALAMAN JUDUL.....	i
LEMBAR PERSETUJUAN.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN.....	iii
PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI .....	iv
ABSTRAK .....	v
ABSTRACT.....	vii
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	ix
MOTTO .....	ix
KATA PENGANTAR.....	x
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR TABEL.....	xi
DAFTAR GAMBAR.....	xii
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
1.1    LATAR BELAKANG.....	1
1.2    Rumusan Masalah.....	3
1.3    Tujuan Penelitian.....	3
1.4    Manfaat penelitian.....	4
BAB II.....	5
TINJAUAN PUSTAKA .....	5
2.1    Sistem Akuntansi Pemerintah.....	5
2.1.1 Pengertian Sistem.....	5
2.1.2 Pengertian Akuntansi .....	5
2.1.3 Pengertian Sistem Akuntansi Pemerintah .....	6
2.1.1 Sistem Akuntansi Pengeluaran Kas.....	6
2.2    Karakteristik Akuntansi Pemerintah.....	7
2.4    Konsep Sistem Akuntansi Pengeluaran Kas .....	8
2.5    Prosedur akuntansi pengeluaran kas.....	8
2.6    Konsep Pegawai Negeri Sipil.....	9
2.7    Sistem Penggajian Pegawai Negeri Sipil .....	9

2.8	Pengendalian Internal .....	10
2.9	Penelitian Terdahulu.....	13
2.10	Kerangka Berpikir .....	15
BAB III .....		16
METODOLOGI PENELITIAN.....		16
3.1	Jenis Penelitian .....	16
3.2	Tempat dan Waktu Penelitian .....	16
3.3	Sumber Data .....	16
3.4	Teknik Pengumpulan Data .....	17
3.5	Teknik Analisis Data.....	17
BAB IV .....		18
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....		18
4.1	GAMBARAN UMUM INSTANSI.....	18
4.1.1	Sejarah Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Utara.....	18
4.1.2	Lokasi Instansi .....	19
4.1.3	Visi dan Misi .....	19
4.1.4	Makna Logo .....	20
4.1.5	Struktur Organisasi.....	20
4.2	Hasil Penelitian.....	28
4.2.1	Klasifikasi Pegawai Negeri Sipil .....	28
4.2.2	Deskripsi Sistem Akuntansi Penggajian Pegawai Negeri Sipil .....	29
4.2.3	Fungsi Yang Terkait.....	30
4.2.4	Dokumen Yang Digunakan.....	31
4.2.5	Catatan Akuntansi Yang Digunakan .....	32
4.2.6	Prosedur Dalam Sistem Penggajian .....	32
4.2.7	Unsur Pengendalian Internal .....	33
4.3	Hasil Pembahasan.....	34
4.3.1	Flowchat Sistem Penggajian Pegawai Negeri Sipil Pada DKP Pro Sulut.....	36
4.3.2	Analisis Struktur Organisasi .....	40
4.3.3	Analisis Input Data .....	41
4.3.4	Analisis Aktivitas Penggajian .....	42
4.3.5	Analisis Sistem Output Penggajian .....	42

4.3.6 Perbandingan Berdasarkan Pengendalian Intern.....	42
BAB V.....	48
PENUTUP.....	48
5.1 Kesimpulan.....	48
5.2 Saran.....	48
DAFTAR PUSTAKA .....	50
LAMPIRAN.....	52



# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Dalam Pemerintahan pentingnya kinerja profesional dan efisiensi dalam mengelola keuangan dan menggaji pegawai negeri sipil. Ditekankan bahwa penggunaan sistem informasi akuntansi yang tepat adalah kunci untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam operasional pemerintahan. Pemerintah baik di tingkat pusat maupun daerah, harus berhati-hati dalam mengelola kas. Dengan adanya sistem informasi akuntansi yang tepat, manajemen dapat mengevaluasi efisiensi operasional dan memastikan keakuratan setiap transaksi keuangan.

Pengeluaran kas merupakan suatu aktifitas dalam suatu pemerintahan yang tidak mungkin dapat dilepaskan, pemerintah haruslah berhati-hati dalam melakukan aktifitas yang berhubungan dengan pengeluaran kas, artinya setiap penerimaan dan pengeluaran kas yang dilakukan harus diperhitungkan manfaat dan keuntungan yang akan didapat. Keberadaan sistem informasi akuntansi yang benar dalam sebuah perusahaan, akan membuat manajemen dalam organisasi perusahaan tersebut dapat mengevaluasi hasil akhir dari suatu kegiatan operasi apakah sudah berjalan sesuai dengan yang diharapkan (efisien dan efektif). Disamping itu sistem informasi akuntansi dapat digunakan dalam penugasan dan wewenang sebagai pedoman bagi sumber daya manusia yang bekerja dalam organisasi atau perusahaan tersebut, sehingga dapat berjalan sesuai prosedur yang ada. Memperoleh informasi yang sangat dibutuhkan dalam sebuah organisasi bisa diperoleh dengan cepat, tepat waktu, akurat, dan relevan disebabkan oleh adanya sistem informasi akuntansi. Salah satu komponen belanja negara yang dikelola secara transparan dan akuntabel adalah penggajian pegawai negeri sipil (PNS). Akuntansi pengeluaran kas untuk penggajian PNS sangat penting untuk menjaga kerahasiaan keuangan dan memastikan bahwa administrasi keuangan dilakukan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Menurut (Nathan & Scobell, 2012) Sistem akuntansi adalah organisasi formulir, catatan dan laporan yang di koordinasi sedemikian rupa untuk menyediakan informasi keuangan yang dibutuhkan oleh manajemen dalam pengelolaan.. Secara keseluruhan, penggunaan sistem akuntansi yang baik sangat penting dalam

mendukung upaya pemerintah untuk meningkatkan profesionalisme dan efisiensi dalam menjalankan tugas-tugas administratif mereka.

Sistem akuntansi penggajian sangatlah berkaitan dengan pengendalian intern perusahaan. Keberadaan sistem akuntansi penggajian merupakan salah satu upaya dalam rangka meningkatkan pengendalian intern perusahaan. Apabila sistem akuntansi penggajian yang dimiliki perusahaan dapat berjalan dengan baik, maka pengendalian intern perusahaan tersebut dapat dilaksanakan dengan baik pula.

Gaji mempunyai arti penting bagi karyawan sebagai individu karena besarnya gaji mencerminkan ukuran nilai karya mereka diantara para karyawan itu sendiri, keluarga, dan masyarakat. Tingkat pendapatan absolut karyawan akan menentukan skala hidupnya, dan pendapatan relatif mereka menunjukkan status, martabat, dan harganya.

Sistem penggajian merupakan sistem yang membantu dalam mengelola hal-hal yang berkaitan dengan gaji. Adanya sistem dalam kegiatan penggajian sangat penting untuk menghindari adanya kesalahan maupun kecurangan dari pihak bersangkutan. Dalam memberikan gaji pegawai, sebuah instansi harus melalui prosedur penggajian yang benar agar lebih efektif dan efisien. Dan mengingat betapa pentingnya sistem akuntansi penggajian dan suatu instansi, maka harus diketahui sejauh mana sistem akuntansi penggajian yang digunakan atau diterapkan dalam dinas kelautan dan perikanan provinsi Sulawesi utara.

Dinas Kelautan dan Perikanan merupakan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Provinsi Sulawesi Utara, wajib menetapkan sistem dan prosedur yang tepat untuk mengelola keuangannya melalui sistem dan prosedur yang tepat sebagai tindakan pencegahan terhadap penggelapan dan penyalahgunaan dana. Berdasarkan pedoman tentang Pelaporan dan Akuntabilitas Keuangan Daerah. Dengan latar belakang tersebut, perlu adanya perbaikan sistem dan prosedur pencairan tunai di Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara, khususnya pada Dinas Kelautan dan perikanan dengan menggunakan mekanisme Uang Persediaan (UP). Ganti Uang (GU), Tambah Uang Persediaan (TUP) dan Langsung (LS).

Jadi berdasarkan hal tersebut maka penulis mengangkat dan menulis dalam surat karya ilmiah yang berjudul "EVALUASI PENERAPAN SISTEM AKUNTANSI PENGELUARAN KAS PENGGAJIAAN PEGAWAI NEGERI

SIPII PADA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI SULAWESI UTARA”.

### **1.2 Rumusan Masalah**

Rumusan masalah yang relevan untuk evaluasi penerapan sistem akuntansi pengeluaran kas penggajian pegawai negeri sipil pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Utara dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana sistem pengeluaran kas penggajian pegawai negeri sipil pada Dinas kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Utara
2. Apakah sistem pengeluaran kas penggajian pegawai negeri sipil pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Utara telah efektif dan efisien.

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang diatas diambil rumusan masalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana sistem pengeluaran kas penggajian pegawai negeri sipil Pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Utara.
2. Untuk mengetahui apakah Sistem pengeluaran kas penggajian pegawai negeri sipil Pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Utara telah efektif dan efisien.



#### 1.4 Manfaat penelitian

Penelitian ini dilakukan agar dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

a) Bagi Politeknik Negeri Manado

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk menambah pemahaman dan pengetahuan pembaca serta dapat dijadikan referensi penelitian yang berkaitan dengan hasil dari penelitian ini.

b) Bagi Dinas Kelautan Dan Perikanan Provinsi Sulawesi Utara Penelitian ini dapat memberikan manfaat dan masukan serta pertimbangan sebagai pemahaman yang lebih dalam tentang bagaimana sistem penggajian pegawai negeri sipil yang benar dan sesuai dengan aturan yang berlaku.

c) Bagi Penulis Sebagai tambahan wawasan pengetahuan yang baru buat penulis dalam hal sistem akuntansi pengeluaran kas penggajian pegawai negeri sipil pada instansi

